

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENADAHAN DI KABUPATEN BULUKUMBA**

(Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/2014/PN.BLK)



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum

Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

(UIN) Alauddin Makassar

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh :

MIFTAHUL MUTATAHIRIN

NIM.10500113022

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Miftahul Mutatahirin
Nim : 10500113022
Tempat/Tgl. Lahir : Bulukumba/ 11 November 1995
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : BTN Gowa Sarana Indah D5/4
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan di
Kabupaten Bulukumba Studi Putusan Nomor
45/Pid.B/2014/PN.BLK.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Gowa, 20 Agustus 2017
Penyusun,

Miftahul Mutatahirin

NIM : 10500113022

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul *"Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penadahan di Kabupaten Bulukumba Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/2014/PN.BLK"* yang disusun oleh saudara/I **Miftahul Mutatahirin, NIM: 10500113022**, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasah yang diselenggarakan pada hari rabu, tanggal 9 Agustus 2017, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Gowa, 20 Agustus 2017

DEWAN PENGUJI

| | | |
|---------------|---|---------|
| Ketua | : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag | (.....) |
| Sekretaris | : Dr. H. M. Saleh Ridwan, M. Ag | (.....) |
| Penguji I | : Rahman Syamsuddin, S.H.,M.H | (.....) |
| Penguji II | : A. Intan Cahyani, S.Ag.,M.Ag. | (.....) |
| Pembimbing I | : Dr. Hamsir, S.H.,M.Hum. | (.....) |
| Pembimbing II | : Dr. Fadli Andi Natsif, S.H., M.H. | (.....) |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum,
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin M.Ag
NIP.19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatulahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan ini sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kejalan yang lurus seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Karya tulis ilmiah ini berbentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana Penadahan di kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2014/PN.BLK)”, merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan strata satu (S1) program studi Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritis dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Cukup banyak kesulitan yang penulis temui dalam penulisan skripsi ini, tetapi Alhamdulillah dapat penulis atasi dan selesaikan dengan baik.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih untuk semua pihak yang sudah membantu proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis ingin mengucapkan terimakasih atas kebesaran jiwa dan kasih sayang yang tak bertepi, doa yang tiada terputus dari kedua orang tua yang tercinta, Ayahanda Munansar Baehaky dan Ibunda Rosniah Hatijah yang senantiasa memberikan penulis curahan kasih sayang, nasihat, perhatian, bimbingan serta doa restu yang selalu diberikan sampai saat ini.

Selanjutnya penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang terdalam dan tak terhingga terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.SI. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya;
3. Ibu Istiqamah, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak Dr. Hamsir, S.H.,M.Hum. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Fadli Andi Natsif, S.H., M.H. selaku pembimbing II. Kedua beliau, di tengah kesibukan dan aktifitasnya bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Rahman Syamsuddin, S.H.,M.H. selaku penguji I dan Ibu A. Intan Cahyani, S.Ag.,M.Ag. selaku penguji II yang senantiasa memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf akademik dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar;
7. Kepada teman kelas Ilmu Hukum A, Kompleks BTN 2 Bulukumba dan keluarga besar Ilmu Hukum 2013, terimakasih atas motivasi serta dukungan yang selama ini diberikan;
8. Kepada Sahabatku, Muh. Nur Khutbanullah Lissalam dan Muh. Hasan atas kebersamaan dan pengalaman yang berharga serta selama ini serta memberikan kritikan dan saran yang sifatnya memotivasi penulis.
9. Seluruh teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 53 Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa yang selalu mendukung selama penyusunan skripsi ini;

10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Atas segala bantuan, kerjasama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini. Begitu banyak bantuan yang telah diberikan bagi penulis, namun melalui doa dan harapan penulis, Semoga jasa-jasa beliau yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dengannya dari Allah swt.

Akhirnya dengan penuh rendah hati penulis mengharap tegur sapa manakala terdapat kekeliruan menuju kebenaran dengan mendahulukan ucapan terima kasih yang tak terhingga.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 27 Juli 2017

Penulis

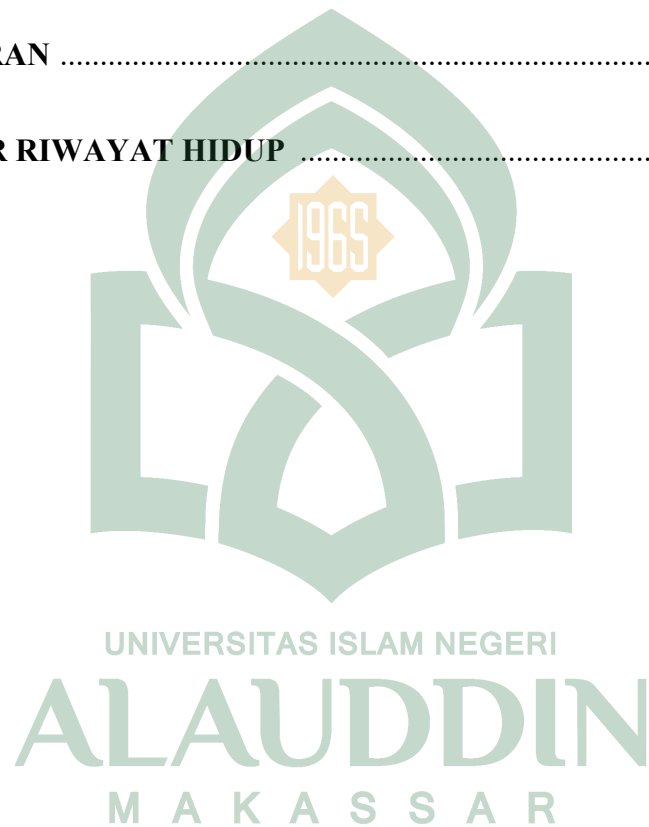
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Miftahul Mutatahirin

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| Judul | i |
| Pernyataan Keaslian Skripsi..... | ii |
| Lembar Pengesahan Skripsi..... | iii |
| Kata pengantar | iv |
| Abstrak | x |
| BAB I Pendahuluan | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus | 5 |
| C. Rumusan Masalah | 5 |
| D. Kajian Pustaka..... | 6 |
| E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 7 |
| BAB II Tinjauan Teoritis | 9 |
| A. Pengertian Tindak Pidana | 9 |
| B. Tindak Pidana Penadahan | 16 |
| C. Tindak Pidana Pencurian | 21 |
| 1. Pengertian Pencurian | 21 |
| 2. Jenis-jenis dan Unsur Pencurian | 21 |
| D. Penyertaan dan Pembantuan Dalam Tindak Pidana | 30 |

| | |
|---|-----------|
| E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana | 36 |
| F. Pandangan Islam Tentang Tindak Pidana | 43 |
| BAB III Metode Penelitian..... | 46 |
| A. Jenis dan Lokasi Penelitian | 46 |
| B. Pendekatan Penelitian..... | 47 |
| C. Sumber Data | 47 |
| D. Metode Pengumpulan Data | 48 |
| E. Instrumen Penelitian..... | 48 |
| F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data..... | 49 |
| G. Pengujian Keabsahan Data | 50 |
| BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan..... | 52 |
| A. Bagaimanakah Aturan Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Penadahan | 52 |
| B. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan | 69 |
| 1. Identitas Terdakwa | 69 |
| 2. Kasus Posisi | 69 |
| 3. Dakwaan | 71 |
| 4. Tuntutan | 72 |
| 5. Pertimbangan Hakim | 73 |
| 6. Amar Putusan | 81 |
| 7. Analisis Putusan | 84 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| BAB V Penutup | 87 |
| A. Kesimpulan | 87 |
| B. Saran..... | 88 |
| DAFTAR PUSTAKA | 89 |
| LAMPIRAN | 91 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 94 |



ABSTRAK

Nama : Miftahul Mutatahirin
Nim : 10500113022
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan di Kabupaten Bulukumba “Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/2014/PN.BLK”.

Skripsi ini membahas Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana Penadahan di kabupaten Bulukumba “Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2014/PN.BLK, kemudian dirumuskan kedalam beberapa rumusan masalah yaitu 1) Bagaimanakah aturan hukum pidana terkait tindak pidana penadahan ? 2) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2014/PN.BLK?

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan Normatif dan Penelitian Hukum Empiris, yang memiliki korelasi terhadap masalah yang diteliti serta menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi dilapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Aturan hukum pidana terkait dengan tindak pidana Penadahan terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pada Pasal 480, Pasal 481 dan Pasal 482 KUHP. Tindak pidana penadahan dalam Pasal 480 KUHP Tindak pidana penadahan tidaklah terjadi serta merta melainkan didahului oleh tindak pidana pencurian kemudian dikaitkan dengan penyertaan. 2) Pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana dalam perkara pidana penadahan dalam putusan Nomor 45/Pid.B/2014/PN.Blk bahwa putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan atas tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap di persidangan kemudian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP tentang penadahan telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti serta terdapatnya pertimbangan- pertimbangan yuridis menurut KUHP, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan Hakim.

Pemerintah perlu membuat aturan hukum di Indonesia sebaiknya dibuat sejelas mungkin agar tidak menimbulkan *ambiguitas* dalam penerapannya serta agar semua perbuatan yang meresahkan mesyarakat dapat dikenai hukuman yang tegas (*legal certainty*). Masyarakat diharapkan selalu waspada dan curiga, terutama terhadap barang bekas yang dijual dengan harga yang sangat jauh dari harga pasaran, terlebih lagi jika tidak dilengkapi dengan surat/nota bukti pembelian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang melakukan pembangunan di berbagai bidang. Usaha yang dilakukan oleh negara ini meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang hukum dari tahun ke tahun yang diusahakan pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, frase ini tertuang dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945.¹ Hal tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan negara Indonesia harus selalu berdasar dan sesuai dengan kehendak hukum.

Hukum telah menjadi suatu Panglima yang menetapkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum bukan hanya yang untuk memberikan sanksi pidana terhadap orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi, hukum senantiasa berusaha untuk menjamin dan melindungi hak-hak individu dan masyarakat serta menjaga kepentingan Negara.

¹ Majelis Per,usyawaratan Rakyat Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015) h.116

Peraturan-peraturan yang telah ada dalam lingkungan masyarakat wajib untuk ditaati karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan antar anggota masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat akan menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, tentunya akan menjadi factor pemicu timbulnya berbagai kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak.

Kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara yang sedang berkembang. Berdasarkan Data Pengadilan Negri Bulukumba ada 102 kasus pencurian dalam kurun waktu 5 tahun yakni 2013-2017.

Tabel Jumlah Kasus Pencurian di Wilayah Hukum Pengadilan Negri Bulukumba

| No | Tahun | Jumlah Kasus |
|-------|-------|--------------|
| 1 | 2013 | 20 |
| 2 | 2014 | 28 |
| 3 | 2015 | 14 |
| 4 | 2016 | 38 |
| 5 | 2017 | 2 |
| Total | | 102 |

Kasus pencurian ini mengalami peningkatan dan penurunan pada setiap tahunnya.²

Dengan adanya peningkatan kejahatan seperti diuraikan di atas, maka hukum menempati posisi yang paling Urgen untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.³

Belakangan ini, telah terjadi banyak tindak pidana terhadap harta kekayaan dan tentunya banyak menarik perhatian masyarakat Indonesia diantaranya pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, dan termasuk pula penadahan. Tindak pidana penadahan menurut *Code Penal* Prancis, yaitu :

“sesuai dengan kebanyakan perundang-undangan pidana dari berbagai Negara di Eropa yang berlaku pada abad ke-18, perbuatan menadah benda-benda yang diperoleh karena kejahatan tidak dipandang sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri atausebagai suatu *zelfstandig misdrijf*, melainkan sebagai suatu perbuatan membantu melakukan kejahatan atau sebagai suatu *medeplichtigheid* dalam suatu kejahatan, yaitu dengan perbuatan mana pelaku dapat memperoleh benda-benda yang diperoleh dari kejahatan”.⁴

²Pengadilan Negeri Bulukumba “Sistem Informasi Pengadilan Bulukumba” www.pn.bulukumba.go.id diakses pada tanggal 29 maret 2017 pada pukul 15.55

³ Hari Saherodji, *pokok-Pokok Kriminologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1980) h.20

⁴ Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h. 362.

Menurut R. Soesilo, Penadahan sebagaimana dijabarkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah: Yang dinamakan “sekongkol” atau biasa pula disebut “tadah” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada pasal 480 ayat (1) KUHP karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.⁵

Maraknya kasus tindak pidana penadahan yang terjadi di Kabupaten Bulukumba telah menjadi rahasia umum oleh masyarakat, banyak masyarakat yang mengetahui hal tersebut bahwa tindakan tersebut merupakan kejahatan, akan tetapi sebagian dari mereka cenderung mengabaikannya disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan kataatan hukum masyarakat, sehingga perbuatan tersebut bertendensi untuk diabaikan. Selain mengabaikan, Banyak pula yang justru memanfaatkan hal tersebut, dengan pertimbangan bahwa Barang yang dijual penadah jauh lebih murah jika dibandingkan dengan barang yang legal, sehingga karena pertimbangan ekonomi banyak diantara masyarakat justru memberdayakan para Penadah demi barang yang terjangkau dan harga yang bersahabat. Seperti yang pernah terjadi di “Desa Dampang

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*,(Jakarta: Sinar Grafika, 1988) h. 314

Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, seorang petani yang diduga terlibat dalam kasus Penadahan barang curian (Sepeda Motor).⁶

Semakin maraknya kasus Penadahan di Kabupaten Bulukumba, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan pengadilan mengenai Penadahan. Apakah dalam putusan Pengadilan tersebut tidak memberikan efek jera kepada pelaku Penadahan sehingga sampai hari ini masih begitu banyak kasus Penadahan yang terjadi di kabupaten Bulukumba. Adapun Judul penelitian dari penulis yaitu “Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana Penadahan di kabupaten Bulukumba “Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2014/PN.BLK””

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus pada penelitian ini adalah seperti apa penerapan hukum pidana materil tentang tindak pidana penadahan serta melihat sejauh manakah pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi atau memutus perkara tentang penadahan, dalam skripsi ini penulis mengangkat putusan Nomor 45/Pid.B/2014/PN.BLK.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian-uraian diatas maka rumusan masalah skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah aturan hukum pidana terkait tindak pidana penadahan ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam

Putusan Nomor 45/Pid.B/2014/PN.BLK ?

⁶Tribrata, News. <https://tribratanewspolresbulukumba.com/sat-reskrim-polres-bulukumba-menangkap-pelaku-perantara-tebus-motor-hasil-curian>, diakses pada tanggal 21 maret 2017 pada pukul 16.24 Wita.

D. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penulis, sebagai berikut:

Dalam buku yang diterbitkan oleh Redaksi Bhafana Fublishing, tentang KUHP KUHAP, dalam buku ini memuat berbagai peraturan umum yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana serta memuat berbagai proses dan mekanisme penyelesaian permasalahan di pengadilan terhadap pelanggaran yang terjadi di KUHP, hal tersebut di rangkum dalam isi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam sebuah karya tulis yang berjudul tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian dan upaya penerapan atau penegakan hukumnya (studi kasus di kepolisian Resort kota Medan), dalam karya tulis ini membahas mengenai peraturan tentang pencurian dan penadahan serta berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberantas pencurian dan para pelaku penadahan , selain itu, dalam karya tulis ini juga membahas mengenai faktor penyebab seseorang melakukan pencurian dan penadahan.

Dalam karya tulis yang berjudul Sanksi Pidana terhadap pelaku Penadahan kendaraan bermotor hasil curian (studi kasus di pengadilan negeri kelas 1a Palembang), dalam karya tulis ini dijelaskan berbagai macam jenis-jenis penadahan termasuk penadahan motor curian dan alasan-alasan para pelaku melakukan penadahan serta sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku penadahan apabila tertangkap dan terbukti melakukan penadahan.

Selain karya tulis diatas, dalam penyusunan karya tulis ini masih banyak berbagai literature buku dan karya tulis lain yang juga sejalan dengan karya tulis penulis sehingga penulis menggunakannya sebagai referensi demi kesuksesan karya tulis yang sedang dbuat oleh penulis.

Dalam karya tulis ini, sebelumnya belum pernah dibahas oleh siapapun. Maka dari itu penuyusun mengangkat kasus ini sebagai karya tulis atau skripsi.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Sejauh manakah peranan Kepolisian dalam kasus tindak pidana penadahan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim beserta alasan-alasan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana penadahan.

Selain tujuan diatas, Penulis berharap skripsi ini juga memiliki kegunaan, adapun kegunaannya adalah sebagai sarana untuk menambah keilmuan dan intelektualitas penulis dan para pembaca, dan sebagai informasi kepada masyarakat untuk memiliki kesadaran hukum dan bergerak bersama untuk membantu penegak hukum dalam memberantas kejahatan utamanya tindak pidana Penadahan yang marak terjadi di Kabupaten Bulukumba.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang telah mempergunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*.”¹ sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.²

Menurut Moeljanto bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³

¹P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hal.181.

² P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, hal.181.

³ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*.(Jakarta: Bina Aksara, 1984) H. 5

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum.⁴

Seringkali tindak pidana dianonimkan dengan Delik yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *Delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.”⁵

Menurut Simons, *Strafbaar Feit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.⁶ Menurut Bambang Poernomo, Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁷

Menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-

⁴Masruchin, Rubai . *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Malang: UM press dan FH UB,2001) H. 21

⁵ Ebta Setiawan, <http://kbbi.web.delik>, pada tanggal 17 Desember 2016 pukul 22.50

⁶ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011)

h.23

⁷ Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992) h.130

unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.⁸

Menurut Mr.R.Tresna, peristiwa pidana adalah “Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturanlainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman.”⁹

Selain itu menurut Pompe bahwa ada dua macam definisi terkait tindak pidana yaitu

- a. Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggaran harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat pasif, biasanya dilakukan didalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.¹⁰

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-azas Hukum pidana di Indonesia memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu

⁸ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Penerbit Alumni AHM-PTHM, 1986), h.211.

⁹ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: penerbit AlumniAHM-PTHM, 1986), h. 208-209

¹⁰ Zainal Abidin, *HukumPidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 225

tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.¹¹

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Tindak pidana formil dan tindak pidana materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang, misalnya mengenai Pasal 362 KUHP yaitu mengenai tindak pidana pencurian, sedangkan tindak pidana materiil yaitu tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang, contohnya Pasal 338 KUHP yaitu mengenai tindak pidana pembunuhan. Pada Pasal 338 tersebut dititik beratkan pada akibatnya yaitu hilangnya nyawa seseorang.

b. Tindak pidana *commisionis*, Tindak pidana *omissionis*, Tindak pidana *commissionis per omissionem comisa*.

Pengklasifikasian dari tindak pidana ini didasarkan pada cara mewujudkan tindak pidana tersebut. Suatu tindak pidana itu terdiri dari suatu pelanggaran terhadap

¹¹Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), h. 1.

suatu larangan atau dapat juga terdiri dari suatu pelanggaran terhadap keharusan. Definisi dari tindak pidana *commisionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan yaitu dengan jalan melakukan perbuatan yang dilarang, contohnya yaitu tindak pidana penipuan dan pembunuhan.

Sedangkan tindak pidana *omissionis* adakah tindak pidana berupa pelanggaran-pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut undang-undang, contohnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (Pasal 224 KUHP). Tindak pidana *comissionis per omissionem comisa* yaitu tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap pelanggaran, tetapi dilakukan dengancara tidak berbuat, contohnya seorang ibu yang berniat untuk membunuh anaknya dengan jalan tidak memberikan air susu kepada anaknya.

c. Tindak pidana *dolus dan culpa/opsettelijke delicten dan culpooze delicten*

Pembedaan tindak pidana ini didasarkan pada sikap batin petindak. *Opsettelijke delicten* adalah delik-delik yang oleh pembuat undang-undang telah disyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan dengan sengaja. Sedangkan *culpooze delicten* adalah delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan bahwa delik-delik tersebut cukup terjadi dengan tidak sengaja agar pelakunya dapat dihukum.

d. Tindak pidana aduan dan bukan aduan

Dasar pembedaan tindak pidana ini adalah berkaitan dengan dasar penuntutannya. Definisi dari tindak pidana aduan ini adalah tindak pidana yang baru dilakukan penuntutan apabila terdapat pengaduan dari korban. Tindak pidana aduan ini dibagi menjadi dua yaitu tindak pidana aduan absolute dan tindak pidana relatif. Tindak pidana aduan ini dibagi menjadi dua yaitu tindak pidana yang menurut

sifatnya baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari korban, contohnya Pasal 284 KUHP tentang perzinahan.

Tindak pidana aduan absolute tidak dapat dipecah, dalam tindak pidana ini yang dituntut adalah peristiwanya atau pebuatannya. Tindak pidana aduan relatif yaitu tindak pidana yang pada dasarnya bukan tindak pidana aduan akan tetapi berubah menjadi tindak pidana aduan karena ada hubungan khusus antara petindak dengan korban. Contohnya pencurian dalam lingkungan keluarga yaitu Pasal 367 KUHP, definisi mengenai tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya selalu dapat dilaksanakan walaupun tidak ada pengaduan dari korban.

e. Delik umum dan Delik-delik khusus

Delik umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapapun sedangkan delik khusus adalah tindak pidana yang hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang memenuhi kualifikasi atau memiliki kualitas tertentu, misalnya pegawai negeri, pelaut, dan militer¹²

Didalam buku II KUHP tentang Kejahatan dan buku III KUHP tentang pelanggaran, banyak sekali rumusan-rumusan perbuatan beserta sanksinya yang dimaksud untuk menunjuk perbuatan-perbuatan yang dilarang dan pantang dilakukan.

Contoh 1 :

Tindak Pidana Pencurian (Pasal 362 KUHP), terdapat unsur - unsur pokok sbb :

1. Mengambil barang orang lain ;
2. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum.

¹²Suhartono Arif, <http://ipuarifshartono.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-unsur-unsur-jenis-dan-subyek.html> diakses pada tanggal 12 Desember 2016 pukul 12.39 wita

Ad. 1

Unsur pertama dari pasal ini menyatakan mengambil barang orang lain. Maksud dari frasa ini adalah bahwa tidak setiap perbuatan yang mengambil milik orang lain merupakan tindak pidana pencurian. Sebab ada orang yang mengambil barang orang lain untuk disimpan dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya.

Ad. 2

Untuk membedakan bahwa apa yang dilarang itu bukanlah setiap pengambilan barang orang lain, maka dalam pasal 362 KUHP, disamping unsur-unsur tadi, ditambah juga dengan elemen lain, yaitu : dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum.

Contoh 2 :

Tindak Pidana Penadahan (*helings*), pasal 480 KUHP.

Pasal 480 KUHP yang dapat dirumuskan dengan unsur – unsur sbb :

Pasal 480 ke-1 : 1. Membeli, menyewa, menukar, menggadaikan, menerima sebagai hadiah, menjual untuk dapat untung, mengganti menerima sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan barang ; 2. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga berasal dari kejahatan.

Dalam Pasal 480 ke-2 ini dapat dirumuskan sbb :

1. Menarik untung dari hasil sesuatu barang ;
2. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga berasal dari kejahatan.

Ad.

Bahwa untuk beberapa pasal tidak serta merta dapat dikupas satu persatu, oleh karena apabila hal tersebut dilakukan maka akan menghilangkan esensi dari pasal tersebut. Sehingga pengertian umum yang dari perbuatan yang dilarang saja yang dicantumkan

dalam rumusan delik, sedangkan hal - hal yang menjadi batasan - batasan diserahkan pada ilmu pengetahuan dan praktik peradilan.¹³

B. Tindak Pidana Penadahan

Penadahan merupakan suatu Tindak Pidana yang tidak berdiri sendiri, melainkan suatu tindak pidana yang diawali dengan tindak pidana asal (*predicate crime*), untuk dapat tidaknya seseorang disangka melakukan tindak pidana penadahan, maka terlebih dahulu harus jelas tindak pidana asalnya. Karena bagaimana mungkin menuduh seseorang melakukan tindak pidana penadahan tanpa jelas terlebih dahulu barang yang diperolehnya itu berasal dari kejahatan atau bukan.¹⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tadah diartikan:

- a. Tadah : barang untuk menampung sesuatu;
- b. Bertadah : memakai tadah (alas, lapik);
- c. Menadah : menampung atau menerima barang hasil curian (untuk menjualnya lagi);
- d. Menadahkan : memakai sesuatu untuk menadah;
- e. Tadahan : hasil atau pendapatan menadah;
- f. Penadah : orang yang menerima barang gelap atau barang curian.¹⁵

Dalam Kamus hukum memberikan pengertian penadahan dengan melihat kata dasarnya, penadahan berasal dari kata “tadah” yang artinya menampung/menerima yang selanjutnya berkembang menjadi “menadah” yang artinya menampung barang asal delik.

¹³ Arjana Bagaskara, <http://arjanalawyer.blogspot.co.id/2014/03/cara-atau-teknik-untuk-merumuskan.html> diakses pada tanggal 10 Agustus 2017 pukul 14.30 Wita.

¹⁴ Wawancara bersama Prof. Aswanto (Hakim Mahkamah Konstitusi)

¹⁵ Ebta Setiawan, <http://kbbi.web.id/tadah>, pada tanggal 17 Desember 2016 pukul 22.55 Wita

Istilah suatu tindak pidana penadahan dalam dunia kriminal yaitu di karenakan membeli barang yang ternyata merupakan hasil kejahatan seperti pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan termasuk pula barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, seperti mata uang palsu, uang kertas palsu, dan diploma palsu.

Mengenai penadahan Satochid Sartanegara mengatakan “Tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak mungkin ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya. Penadahan dapat dikatakan delik pemudahan, karena dengan adanya penadahan, memudahkan seseorang melakukan kejahatan, salah satunya adalah pencurian, dengan adanya seseorang yang menadah maka memudahkan orang mencuri karena adanya tempat dalam menyalurkan barang hasil curiannya.¹⁶

Tindak pidana penadahan telah diatur dalam Bab XXX dari buku II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan, pengertian tindak pidana penadahan menyangkut kelakuan dan kesalahan pelaku ditentukan dalam Pasal 480 KUHP yang menyatakan: “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah:

1. barang siapa membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan;

¹⁶P.A.F. Lamintang, *Delik - Delik Khusus Kejahatan - Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, h. 337

2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya dapat diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”¹⁷

Untuk perbuatan tersebut dapat dikatakan tindak pidana penadahan, maka cukup satu saja dari jenis perbuatan yang tersebut yang di buktikan. “Elemen penting dari Pasal ini adalah “seseorang patut mengetahui atau menyangka” bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan.” Jadi seseorang tersebut tidak perlu mengetahui dengan pasti dari kejahatan apa barang itu berasal tetapi ia cukup menduga bahwa barang tersebut berasal dari hasil kejahatan.

Adapun Unsur-Unsur tindak pidana Penadahan yaitu :

Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP terdiri atas :

- a. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari dari :
 1. Yang ia ketahui atau *waarvan hij weet*
 2. Yang secara patut harus dapat ia duga atau *warn hij redelijkerwijs moet vermoeden*
- b. Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari :
 1. Kopen atau membeli
 2. Buren atau menyewa
 3. Inruilen atau menukar
 4. In pand nemen atau menggadai
 5. *Als geschenk aannemen* atau menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian
 6. *Uit winstbejag* atau didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan

¹⁷ Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP KUHP*, (Jakarta: Bhafana Publishing, 2014) h.140-

7. *Verkopen* atau menjual
8. *Verhuren* atau menyewakan
9. *In pand geven* atau menggadaikan
10. *Vervoeren* atau mengangkut
11. *Bewaren* atau menyimpan dan
12. *Verbergen* atau menyembunyikan.¹⁸

Karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing yakni unsur kesengajaan atau unsur *dolus* dan unsur ketidaksengajaan atau unsur *culpa* atau dengan kata lain karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai unsur subjektif yang *pro parte dolus* dan *pro parte culpa*, maka di dalam surat dakwaannya penuntut umum dapat mendakwakan kedua unsur subjektif tersebut secara bersama-sama terhadap seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 angka 1 KUHP.

Sedangkan dalam ayat (2) dirumuskan penadahan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur-Unsur Obyektif
 - a. Perbuatan yang bertujuan menarik keuntungan dari
 - b. Objeknya adalah hasil dari suatu benda
 - c. Yang diperolehnya dari suatu kejahatan
- 2) Unsur-Unsur Subyektif
 - a. Yang diketahuinya, atau

¹⁸Karim Toiti, <http://karimtoiti27.blogspot.co.id/2013/12/tindak-pidana-penadahan.html> diakses pada tanggal 12 desember 2016 pukul 14.32 Wita

b. Patut menduga benda itu hasil dari kejahatan.¹⁹

Tindak pidana penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan ataupun yang di dalam doktrin sering disebut sebagai *gewoonteheling* oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 481 KUHP yang rumusan aslinya di dalam bahasa Belanda yang artinya sebagai berikut :

1. Barang siapa membuat sebagai kebiasaan pekerjaan dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda-benda yang diperoleh karena kejahatan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
2. Orang yang bersalah dapat dicabut hak-haknya seperti yang diatur dalam pasal 35 NO 1-4 dan dapat dicabut pula haknya untuk melakukan pekerjaan, dalam pekerjaannya kejahatan itu telah dilakukan.

Perbuatan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh karena kejahatan itu tidak perlu selalu diartikan sebagai perbuatan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh karena kejahatan, yakni jika benda tersebut dijual, melainkan jika benda yang diperoleh karena kejahatan itu telah disewakan, digadaikan, dipertunjukkan, bahkan juga jika benda itu telah dibudidayakan, ditenakkan, dan lain-lainnya.

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”.²⁰

¹⁹ Karim Toiti, <http://karimtoiti27.blogspot.co.id/2013/12/tindak-pidana-penadahan.html> diakses pada tanggal 12 desember 2016 pukul 14.35 Wita

²⁰ Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP KUHP*, h.233

C. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian pencurian

Pengertian umum mengenai pencurian adalah mengambil barang orang lain. Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhiran “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.

Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri.

Menurut Pasal 362 KUHPidana pencurian adalah:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Jadi perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang dalam untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHPidana.

2. Jenis-jenis dan unsur pencurian

Adapun jenis pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362-367 KUHPidana yaitu:

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHPidana)

2. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan berkualifikasi (Pasal 363 KUHPidana)
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana)
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana)
5. Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUHPidana)
6. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHPidana)

Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan rumusan Pasal tersebut diatas sebagai berikut:

Ad. 1 Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHPidana), yaitu:²¹

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHPidana terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif sebagai berikut:²²

1. Unsur-unsur objektif :

- a. mengambil;
- b. suatu barang/ benda;
- c. sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

2. Unsur subjektif :

- a. Dengan maksud

²¹ Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²² Rahman Syamsuddin *Merajut Hukum di Indonesia (Jakarta: Mitra Wacana Media)* hal 196.

b. Memiliki untuk dirinya sendiri

c. Secara melawan hukum

Dengan melihat makna dari tiap-tiap unsur maka terlihat bentuk dan jenis perbuatan seperti apa yang dimaksudkan sebagai pencurian menurut KUHPidana

1. Unsur objektif

a. Mengambil Perbuatan “mengambil” bermakna sebagai “setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Perlu diketahui arti kata dari mengambil itu sendiri. Baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, masing-masing yakni:

1. Mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada;
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

Sehingga dapat dimengerti jika dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut yaitu antara lain:

Blok, mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu barang dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan barang tersebut.

Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dalam penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, apabila waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.

Van Bemmelen dan Van Hattum, mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.²³

b. Suatu barang/benda

Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak.

Benda yang dikategorikan barang/benda berwujud dan tidak berwujud misalnya, halaman dengan segala sesuatu yang dibangun diatasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik , dan lain sebagainya. Dengan terjadinya perluasan makna tentang barang/ benda tersebut kemudian dapat pula menjadi objek pencurian.

Konsepsi mengenai barang menunjuk pada pengertian bahwa barang tersebut haruslah memiliki nilai, tetapi nilai barang tersebut tidaklah harus secara ekonomis. Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang yang memiliki pemilik. Apabila barang tersebut tidak dimiliki oleh siapa pun, demikian juga apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang, tidak lagi menjadi suatu objek pencurian.

c. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan barang/ benda yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain. Jadi yang terpenting

²³ Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana. Cet.7. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).*
hal. 79.

dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda/ barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Dengan demikian dalam kejahatan pencurian, tidak dipersyaratkan barang/ benda yang diambil atau dicuri tersebut milik orang lain secara keseluruhan, pencurian tetap ada sekalipun benda/ barang tersebut kepemilikannya oleh orang lain hanya sebagian saja. Dengan kata lain unsur kepemilikan yang melekat pada barang/ benda tersebut tidak bersifat penuh.

2. Unsur subjektif

a. Dengan maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan demikian, unsur “dengan maksud” menunjuk adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, kesengajaan atau dengan maksud tersebut ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum atau tidak sah”.

Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud Pasal 362 KUHPidana harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja.

b. Memiliki untuk dirinya sendiri

Istilah “memiliki untuk dirinya sendiri” seringkali diterjemahkan dengan istilah menguasai. Namun, seseorang yang mengambil benda/ barang pada dasarnya belum sepenuhnya menjadi pemilik dari barang yang diambilnya, tetapi baru menguasai barang tersebut.

Bentuk-bentuk dari tindakan “memiliki untuk dirinya sendiri” atau “menguasai” tersebut dapat berbentuk beberapa hal misalnya menghibahkan, menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan juga suatu tindakan yang bersifat pasif, yaitu tidak melakukan hal apapun terhadap barang tersebut, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.

c. Secara melawan hukum

Unsur “melawan hukum” memiliki hubungan erat dengan unsur “menguasai untuk dirinya sendiri”. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan penekanan pada suatu perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu dapat berubah kedudukan menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Secara umum melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, maka orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana.

Ad.2 Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang berkualifikasi (Pasal 363 KUHPidana), yaitu:

Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan

diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHPidana. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Dipidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:

Ke-1 Pencurian ternak

Ke-2 Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

Ke-3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Ke-4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(1) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Ad. 3 Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana), yaitu:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih ringan dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencucian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

Ad. 4 Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana), yaitu

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan.;

Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau emanjat atau dengan memakia anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salahsatu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Ad.5 Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUHPidana) yaitu:

“dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363, dan 865 dapat dijatuhkan pe njatuhan hak berdasarkan Pasal 35 no. 1-4.

Ad. 6 Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHPidana), yaitu:

- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhdap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- 3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHPidana ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya

masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHPidana akan terjadi, apabila seorang suami atau isteri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda isteri atau suaminya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHPidana apabila suami isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.

D. Penyertaan dan pembantuan dalam tindak pidana

Tindak Pidana Penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut. Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai:²⁴

1. Yang melakukan
2. Yang menyuruh melakukan
3. Yang turut melakukan
4. Yang menggerakkan/menganjurkan untuk melakukan
5. Yang membantu melakukan

Penyertaan diatur didalam pasal 55, 56, dan 57 KUHP. Dalam pasal 55 KUHP klasifikasi pelaku :

1. Mereka yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan,

²⁴ Rahman Syamsuddin *Merajut Hukum di Indonesia*, hal 211.

mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan.²⁵

2. Mereka yang menyuruh melakukan yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannyalah terjadi suatu tindak pidana.²⁶
3. Mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:²⁷
 - a) Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.
 - b) Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Setiap peserta pada turut melakukann diancam dengan pidana yang sama.'
4. Mereka yang menggerakkan/menganjurkan/membujuk yaitu seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu. Syarat-syarat penggerakkan yang dapat dipidana:²⁸
 - a) Ada kesengajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

²⁵ Rahman Syamsuddin *Merajut Hukum di Indonesia*, hal 212.

²⁶ Rahman Syamsuddin *Merajut Hukum di Indonesia* hal. 213

²⁷ Rahman Syamsuddin *Merajut Hukum di Indonesia* hal. 214.

²⁸ Rahman Syamsuddin *Merajut Hukum di Indonesia* hal. 216

- b) Menggerakkan dengan upaya-upaya yang ada dalam pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP : pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, memberi kesempatan, alat, keterangan.
- c) Ada yang tergerak untuk melakukan tindak pidana akibat sengaja digerakkan dengan upaya-upaya dalam pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP.
- d) Yang digerakkan melakukan delik yang dianjurkan atau percobaannya.

Yang digerakkan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana Klasifikasi menurut pasal 56 dan 57 KUHP yaitu membantu melakukan yaitu dengan adanya pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang didalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana dan ada orang lain yang membantu terlaksananya tindak pidana itu.

Pembantuan.

Dalam pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang di dalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan tindak pidana yakni pelaku tindak pidana itu dan ada orang lain yang lagi membantu terlaksananya tindak pidana itu. Hal ini diatur dalam pasal 56 KUHP, yang menyebutkan: Dipidana sebagai pembantu kejahatan kejahatan:²⁹

- 1) Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan yang dilakukan.
- 2) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Dalam hal membantu dalam delik pelanggaran tidak dipidana.

²⁹ Rahman Syamsuddin *Merajut Hukum di Indonesia* hal. 220

Hal ini dipertegas dalam pasal 60 KUHP. Membantu dalam delik pelanggaran tidak dipidana karena dianggap demikian kecil kepentingan hukum yang dilanggar.

Melihat pasal 56 diatas, pembantuan dapat dibedakan berdasarkan waktu diberikannya suatu bantuan terhadap kejahatan, antara lain:

1. Apabila bantuan diberikan pada saat kejahatan dilakukan, tidak dibatasi jenis bantuannya. Berarti jenis bantuan apapun yang diberikan oleh orang yang membantu dalam suatu kejahatan dapat dipidana.
2. Apabila bantuan diberikan sebelum kejahatan dilakukan, jenis bantuan dibatasi yaitu kesempatan, sarana, dan keterangan.

Tentang pertanggungjawaban pembantu termasuk ancaman pidananya termuat dalam pasal 57 KUHP yang berbunyi:³⁰

- 1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga.
- 2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
- 4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkna hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Pertanggungjawaban pembantu dibatasi hanya terhadap tindak pidana yang dibantunya saja. Apabila dalam suatu peristiwa ternyata terjadi tindak pidana yang berlebih, maka tindak pidana yang lebih tersebut bukan merupakan tanggung jawab

³⁰ Rahman Syamsuddin *Merajut Hukum di Indonesia* hal. 222

pembantu. Kecuali tindak pidana yang timbul tersebut merupakan akibat logis dari perbuatan yang dibantunya.

Perbedaan antara pembantuan dan turut serta, terdapat tiga teori, antara lain:

1. Teori Obyektif (*de obyectieve deelnenings theorie*)³¹

Untuk membedakan antara turut serta dengan pembantuan dilihat dari sifat perbuatan yang merupakan obyek tindak pidana. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menurut sifatnya adalah merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang, maka orang tersebut melakukan dalam bentuk “turut serta”. Sedangkan apabila orang tersebut perbuatannya tidak bersifat tindak pidana, dia dianggap melakukan “pembantuan”.

2. Teori Subyektif (*de subyectieve deelnemings theorie*)³²

Dasar teori ini adalah niat dari para peserta dalam suatu penyertaan. Didalam “turut serta” pelaku memang mempunyai kehendak terhadap terjadinya tindak pidana. Sedangkan dalam “pembantuan” kehendak ditujukan kearah “memberi bantuan” kepada orang yang melakukan tindak pidana. Disamping perbedaan kehendak, dalam “turut serta” pelaku mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Apakah ia dibantu atau tidak tetap dia mempunyai tujuan melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam “pembantuan” tidak mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Artinya tujuan disandarkan kepada tujuan sipelaku utama. Artinya “pembantu” hanya memberikan bantuan apabila ia mengetahui ada orang lain yang akan melakukan tindak pidana. Dalam hal kepentingan, peserta dalam “turut serta” mempunyai kepentingan dalam

³¹ Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana. Cet.7. hal. 92*

³² Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana. Cet.7. hal. 94*

tindak pidana, sedangkan “pembantuan” kepentingannya tidak langsung terhadap terjadinya tindak pidana itu, tetapi terbatas atas bantuan yang diberikan.

3. Teori Gabungan (*verenigings theorie*)³³

Artinya dalam hal penerapan delik digunakan teori obyektif. Karena delik formil melarang perbuatan seseorang. Sehingga tepat apabila digunakan teori obyektif. Dalam delik materil digunakan teori subyektif. Karena lebih melihat akibat yang dilarang undang-undang. Dengan digunakannya teori subyektif dapat dilihat kehendak, tujuan serta kepentingan masing-masing peserta. Dalam membedakan antara “turut serta” dengan “pembantuan” di dalam praktek sering dilihat apakah seseorang memenuhi syarat dari bentuk “turut serta” yakni terdapat kesadaran kerja sama dan kerja sama itu secara fisik. Apabila memang memenuhi syarat tersebut maka peserta itu diklasifikasikan sebagai “turut serta”. Sedangkan apabila tidak memenuhi syarat diatas, peserta diklasifikasikan sebagai “pembantuan”.

Perbedaan antara “pembantuan” dengan “menggerakkan”, dapat dibedakan melalui kehendak dari pelaku. Dalam bentuk “penggerakkan” kehendak untuk melakukan tindak pidana baru timbul setelah ada daya upaya dari orang yang menggerakkan. Jadi dimulai oleh penggerak dengan memberi daya upaya, barulah orang yang dapat digerakkan mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal “pembantuan”, dimana dari semula dalam diri pelaku sudah ada kehendak untuk melakukan tindak pidana. Pembantuan baru kemudian diberikan yang dapat berupa sarana, kesempatan dan keterangan.³⁴

³³ Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana. Cet.7. hal. 96*

³⁴ Rahman Syamsuddin *Merajut Hukum di Indonesia hal. 221.*

Pembantuan pasif (*passieve medeplichtigheid*) bahwa terjadinya delik disebabkan atas kewajiabn yang terdapat dalm peristiwa tersebut. Artinya orang yang dianggap membantu terdapat kewajiban, dan kewajiban itu diabaikannya sehingga timbul tindak pidana. Terdapat pula pembantuan pasif yang dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri, misalnya terdapat dalam pasal 110 ayat (2) KUHP yang menyatakan “pidana yang sama dijatuhkan terhadap orang yang dengan maksud hendak menyediakan atau memudahkan salah satu kejahatan yang disebut dalam pasal 104, 106, dan 108,... dst”. Dengan mempermudah terjadinya tindak pidana yang disebutkan diatas, berarti telah dianggap membantu meskipun secara pasif. Dan menurut pasal 110 KUHP diatas dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri dan diancam dengan pelaku pokoknya.

Saksi mahkota juga erat kaitannya dengan penyertaan. Hal ini disebabkan “saksi mahkota” adalah kesaksian seseorang yang sama-sama terdakwa. Dengan kata lain, saksi mahkota terjadi apabila terdapat beberapa orang terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana. Dimana terdakwa akan menjadi saksi terhadap teman pesertanya, sebaliknya, gilirannya terdakwa yang alin menjadi saksi untuk teman peserta lainnya.³⁵

E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

³⁵ Noor Aufa, <https://aufalawyer.wordpress.com/2012/06/17/penyertaan-dan-pembantuan-dalam-tindak-pidana/> diakses pada tanggal 29 juli pukul 15.55

2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 1 butir 11 KUHP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.³⁶ UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.³⁷

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa :

³⁶Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP KUHP*, h.178.

³⁷ Majelis Per,usyawaratan Rakyat Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, h.146-147.

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

Ayat (1) : Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Ayat (2): Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Kesatuan RI Tahun 1945.

Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

3. Tahap Penentuan Pemidanaan

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.³⁸

Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu :

1. Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama,
2. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,
3. Unsur Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

³⁸Ahmad Rifai. *Penemuan hukum*. (Jakarta: Sinar grafika. 2010), h. 9

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh

hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak-pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.³⁹

Selain melihat pertimbangan yuridis dan sosiologis hakim dalam menjatuhkan putusannya juga mempertimbangkan dan mengkaitkan dengan fungsi putusan hakim sebagai *a tool of social engineering* yaitu :

1. Fungsi rekayasa sosial (*social engineering*) dari hakim maupun putusan hakim pada setiap masyarakat (kecuali masyarakat totaliter), ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian terhadap perkembangan hukum sebagai alat evolusi sosial

³⁹Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum*, h. 102.

2. Kebebasan pengadilan yang merupakan hal esensial dalam masyarakat demokratis. Pembatasan lebih lanjut diadakan jika pengadilan menjadi penerjemahan yang tertinggi dari konstitusi. Kecenderungan yang mencolok di tahun-tahun akhir ini tidak dapat dicampuri dengan kebijakan modern Badan Legislatif melalui penafsiran konstitusi yang kakuh dan tidak terlalu objektif. Kata-kata yang bermakna luas dari teks-teks konstitusi sering melahirkan rintangan-rintangan yang tak teratasi.
3. Dalam sistem-sistem hukum, ditangan organ politiklah terletak pengawasan yang tertinggi terhadap kebijakana Badan Legislatif sehingga fungsi Hakim menjadi relative lebih mudah. Fungsi tambahan dari badan pengadilan itu sebagai penafsiran peraturan-peraturan politik dan sebagai wasit terhadap tindakan-tindakan yang administratif sifatnya.
4. Dalam penafsiran presiden dan undang-undang, fungsi pengadilan harus lebih positif dan konstruktif. Penafsiran undang-undang harus dilakukan dengan penafsiran dengan sangat baik dan sangat membantu kebijakan hukum.
5. Dengan semakin banyaknya penggunaan hukum sebagai alat pengendalian sosial serta kebijakan dalam masyarakat modern, maka secara bertahap akan mengurangi bidang “hukumnya pakar hukum” Dengan demikian, fungsi kreatif dari hakimlah yang akan berkembang dalam sistem-sistem hukum kebijaksanaan.⁴⁰

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti,

⁴⁰ Achmad Ali., *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Galia Indonesia, 2008), hlm.158.

disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

F. Pandangan Islam Tentang Tindak Pidana

Dalam Bahasa Indonesia kata jarimah berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan padanan jarimah ialah kata jinayah. Jarimah adalah segala larangan syara' (Melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir. Larangan-larangan syara' tersebut bias berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan.

Dalam hal ini ketika dikaitkan dengan kasus Penadahan, maka dalam islam pelaku penadahan termasuk turut serta dalam melakukan suatu jarimah. Suatu jarimah adakalanya dilakukan oleh satu orang dan kadang pula dilakukan lebih dari satu orang. Apabila beberapa orang bersama-sama melakukan suatu jarimah maka perbuatan tersebut dianggap turut berbuat jarimah. Dan sesungguhnya Allah sangat melarang hamba-hambanya untuk saling tolong menolong, bahu membahu, saling membantu dalam keburukan, Allah hanya mengizinkan hamba-hambanya untuk senantiasa tolong menolong, bahu membahu dan saling membantu dalam hal kebaikan sebagaimana dijelaskan dalam surah Ali-Imran ayat 104 dan Al-Maidah ayat 2 yaitu :

Ali-Imran ayat 104

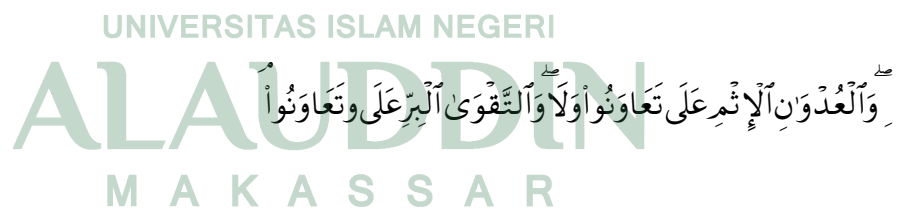
الْمُفْلِحُونَ هُمْ وَأُولَئِكَ الْمُنْكَرُونَ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْخَيْرِ إِلَى يَدِ عُونِ أُمَّةٍ مِّنْكُمْ وَلَتَكُنَّ

Terjemahannya :

”Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”⁴¹

Makna yang dimaksud dari ayat ini ialah hendaklah ada segolongan orang dari kalangan umat ini yang bertugas untuk mengemban urusan tersebut, sekalipun urusan tersebut memang diwajibkan pula atas setiap individu dari umat ini. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Shahih Muslim dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah. Disebutkan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda : “Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, hendaklah ia mencegahnya dengan tangannya. Dan jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan jika masih tidak mampu juga, maka dengan hatinya, yang demikian itu adalah selemah-lemah iman.” Di dalam riwayat lain disebutkan : “Dan tiadalah dibelakang itu (selain dari itu) iman barang seberat biji sawi pun.”

Al-Maidah ayat 2



Terjemahannya :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”⁴²

Ayat ini menjelaskan bahwa sebagian dari mereka saling membantu dan saling mendukung dengan sebagian yang lain tersebut menjelaskan bahwa kita harus

⁴¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Syaamil Al-Qur'an, 2007), h 63.

⁴² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, hal. 106.

tolong menolong dalam hal kebaikan dan taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan adalah tolong menolong dalam melakukan semua yang dicintai oleh Allah SWT dan Rasulnya. Dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa yakni dosa yang kalian lakukan kepada diri kalian sendiri dan permusuhan yakni perbuatan aniaya kepada sesama manusia. Kalian harus selalu merasa diawasi oleh Allah SWT dan takut kepadanya dalam setiap urusan karena dialah pemilik kekuatan yang tak terkalahkan dan siksa yang terperi bagi orang yang menentangnya, durhaka kepada perintahnya dan mengerjakan larangannya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggabungkan antara Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum normatif bias juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in book*) atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepkan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*Law in action*). *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.¹

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

¹ Agenez Liuchan, <http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-hukum-normatif.html> diakses pada pukul 02.40 WITA Tanggal 10 Desember 2016

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dengan difokuskan pada:

- a. Pengadilan Negeri Bulukumba.
- b. Polres Bulukumba

B. Pendekatan Penelitian

Spesifikasi pendekatan pada penelitian ini menggabungkan antara pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif.

1. Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris berarti berarti penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi dilapangan.
2. Sedangkan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif berarti mengkaji tentang perundang-undangan dan peraturan-peraturan dengan teori-teori hukum mengenai penerapan aturan. Pendekatan penelitian tersebut juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau bahan hukum yang lain, sebagai peneliti pustakawan atau peneliti dokumen disebabkan peneliti ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan.

C. Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu :
 - a. Metode wawancara

b. Metode observasi.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, majalah jurnal, karya ilmiah, internet, dan berbagai sumber lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah *field research*, maka data penelitian ini diperoleh dengan bergai cara yaitu:

1. *Interview* (wawancara) yaitu Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Teknik wawancara dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung Hakim, Masyarakat, Polisi, Jaksa untuk dimintai keterangan mengenai sesuatu yang diketahuinya, bisa mengenai suatu kejadian, fakta atau pendapat informan itu sendiri.
2. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti.
3. Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.²

E. Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian. Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini ada beberapa instrumen penelitian yang digunakan yaitu:

1. Pedoman wawancara

²Arief, http://smkn20.ucoz.com/pub/pendidikan/metode_penelitian_skripsi_tesis_disertasi_karya_ilmiah_/instrumen_penelitian_lengkap/5. Diakses pada tanggal 28 maret 2017 pukul 15.03 wita

Pedoman wawancara berfungsi sebagai alat pengarah dalam mengumpulkan data dari Hakim atau Kepolisian pada saat dilakukan wawancara.

2. Observasi

Observasi berarti sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Observasi berupa pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, atau kalau perlu dengan pengecapan. Instrumen yang digunakan berupa pedoman pengamatan, tes, kuisioner, rekaman gambar, dan rekaman suara.

3. Alat Tulis

Alat tulis dalam sebuah penelitian sangat diperlukan dalam proses penelitian, hal ini guna mempermudah dalam proses pengumpulan data sementara dalam bentuk tulisan untuk selanjutnya diolah.³

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu:

1. Penyusunan Data

Data yang sudah ada perlu dikumpulkan agar mudah mengecek apakah semua data yang dibutuhkan sudah lengkap, kegiatan ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi Data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan bila data berdasarkan klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti.

3. Pengolahan Data

³ Rini Andriani, <http://www.membumikanpendidikan.com/2014/09/macam-macam-instrumen-penelitian.html?m=1> diakses pada tanggal 28 maret 2017 pada pukul 15.20 wita

Pengolahan data dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Hipotesis yang akan diuji harus berkaitan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan.

4. Interpretasi Hasil Pengolahan Data

Tahap ini adalah tahap untuk menerangkan setelah peneliti menyelesaikan analisis datanya dengan cermat. Kemudian selanjutnya peneliti menginterpretasikan hasil analisis akhirnya dengan menarik sebuah kesimpulan yang berupa inti sari dari seluruh rangkaian penelitian dan membuat rekomendasi.⁴

Analisis data yang digunakan yakni analisis kualitatif yaitu teknik pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan/ membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoretik, serta mengolah data dan menyajikan dalam bentuk yang sistematis, teratur dan terstruktur serta mempunyai makna. Analisis data tidak hanya dimulai saat sebelum dan setelah penelitian, namun dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Hal ini disertai dengan identifikasi dan pemilaaan terkait data yang dianggap penting dan berhubungan dengan fokus penelitian.

G. Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi *Credibility* (validasi internal), *Transferability* (validasi eksternal), *Dependability* (reabilitas), dan *Confirmability* (obyektivitas).

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas antara lain dilakukandengancarayaitu:

a. Perpanjangan Pengamatan

⁴ Dhias An-nur, <http://diachs-an-nur.blogspot.co.id/2012/05/teknik-pengolahan-data.html?m=1> diakses pada tanggal 28 maret 2017 pada pukul 16.46 wita

Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk menguji kredibilitas data yang telah diperoleh, apakah data yang telah diperoleh telah berubah atau tidak.

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

c. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi merupakan pendukung yang dapat membuktikan data yang telah ditemukan, seperti rekaman wawancara.

2. Pengujian *Transferability*

Pengujian *Transferability* merupakan validasi eksternal, digunakan agar hasil penelitian dapat digunakan dapat diterapkan. Pengujian ini dilakukan dengan membuat laporan yang diurai secara jelas, rinci dan sistematis.

3. Pengujian *Dependability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan kegiatan peneliti dalam melakukan penelitian.

4. Pengujian *Confirmability*

Dalam penelitian ini uji *confirmability* dilakukan bersamaan dengan uji *dependability*, karena pengujian ini harus melibatkan orang lain.⁵

⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012) h.37

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimanakah Aturan Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Penadahan

Hukum Pidana merupakan salah satu materi penting yang harus dipelajari tidak hanya untuk para mahasiswa ataupun pakar hukum, akan tetapi juga untuk masyarakat luas. Oleh karena itu saya akan sedikit membahas mengenai Hukum Pidana. Jadi, Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas". Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi

berupa sanksi pidana.¹ Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana. Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

Berkaitan dalam asas hukum pidana yaitu *Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*, bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, maka pengertian tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud pertanggungjawaban tindak pidana.

Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan.

Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana

¹ Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana. Cet.7. (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada). Hal*

terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.

Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.

Jika unsur kehendak atau menghendaki dan mengetahui dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil karena memang maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam pelaku melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku seringkali hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan si pelaku pada

waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan kepadanya tersebut.

Penadahan sebagai perbuatan pidana merupakan bagian yang terakhir dari delik-delik terhadap harta kekayaan. Apabila si penadah tidak diancam dengan pidana, beberapa jenis penjahat dibiarkan bertindak dengan leluasa, dan keadaan demikian tentu tidak pantas. Justru para penjahat yang lebih tua sering mempergunakan kesempatan menyuruh orang lain melakukan sesuatu dengan penuh resiko dan tinggal dibelakang layar sebagai penadah. Lepas dari itu sulit untuk menentukan, apakah seseorang adalah peserta dalam pencurian, penggelapan atau penipuan, atau apakah hanya penadahan. Sering tukang tadah turut merencanakan kejahatan itu dan turut menikmati keuntungannya. Pembuat undang-undang membicarakan penadahan sesuai delik harta kekayaan lainnya dalam Bab XXX, dengan judul “pemberian bantuan sesudah terjadinya kejahatan”. Tetapi dari judul bab ini tidak boleh ditarik kesimpulan, bahwa terhadap setiap penadahan harus dinyatakan, bahwa dengan bantuan si penadah, kejahatan yang dilakukan semula, dari mana barang itu diperoleh, dipermudah dan bahwa si penadah juga menghendaki hal yang demikian.

Jadi penadahan juga tidak selalu merupakan pemberian bantuan guna mempermudah kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Dalam banyak peristiwa penadahan lebih berupa menarik keuntungan dari kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Akan tetapi peradilan kita berpegang pada syarat, bahwa ”kejahatan itu adalah dari orang lain. Oleh karena itu H.R. berpendapat, bahwa tidak dapat

dilakukan tindakan penadahan terhadap barang-barang yang diperoleh orang dari kejahatannya sendiri.² Dilihat dari kacamata hukum di Indonesia, bahwa hukum pidana kita mengenal tindak pidana terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah tindak pidana penadahan, yang pengaturannya terdapat pada Pasal 480, Pasal 481 dan Pasal 482 KUHP. Tindak pidana penadahan dalam Pasal 480 KUHP dirumuskan sebagai berikut:³

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan”.

Ke-1 Barang siapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya dapat diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Ke-2 Barang siapa menarik keuntungan dari sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Tindak pidana penadahan tidaklah terjadi serta merta melainkan didahului oleh tindak pidana pencurian maka dari itu perlu pula diterangkan bagaimana aturan tentang pencurian dan kaitannya dengan penyertaan.

1. Pengertian pencurian

² Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana. Cet.7. hal. 8.*

³ Pasal 480, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pengertian Pencurian Pengertian umum mengenai pencurian adalah mengambil barang orang lain. Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhiran “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.

Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri.

Menurut Pasal 362 KUHPidana pencurian adalah:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Jadi perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang dalam untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHPidana.

2. Unsur-unsur tindak pidana pencurian

Adapun jenis pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362-367 KUHPidana yaitu:

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHPidana)
2. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan berkualifikasi (Pasal 363 KUHPidana)

3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana)
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana)
5. Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUHPidana)
6. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHPidana)

Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan rumusan Pasal tersebut diatas sebagai berikut:

Ad. 1 Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHPidana), yaitu:⁴

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHPidana terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif sebagai berikut:⁵

1. Unsur-unsur objektif :

- a. mengambil;
- b. suatu barang/benda;
- c. sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

2. Unsur subjektif :

- a. Dengan maksud
- b. Memiliki untuk dirinya sendiri
- a. Secara melawan hukum

⁴ Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵ Rahman Syamsuddin *Merajut Hukum di Indonesia (Jakarta: Mitra Wacana Media) hal 196.*

Dengan melihat makna dari tiap-tiap unsur maka terlihat bentuk dan jenis perbuatan seperti apa yang dimaksudkan sebagai pencurian menurut KUHPidana

1. Unsur objektif

- a. Mengambil Perbuatan “mengambil” bermakna sebagai “setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Perlu diketahui arti kata dari mengambil itu sendiri. Baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, masing-masing yakni:

1. Mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada;
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

Sehingga dapat dimengerti jika dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut yaitu antara lain:

Blok, mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu barang dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan barang tersebut.

Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dalam penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, apabila waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.

Van Bemmelen dan Van Hattum, mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam

penguasaannya tanpa bantuan atau seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.⁶

b. Suatu barang/benda

Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak.

Benda yang dikategorikan barang/ benda berwujud dan tidak berwujud misalnya, halaman dengan segala sesuatu yang dibangun diatasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik , dan lain sebagainya. Dengan terjadinya perluasan makna tentang barang/ benda tersebut kemudian dapat pula menjadi objek pencurian.

Konsepsi mengenai barang menunjuk pada pengertian bahwa barang tersebut haruslah memiliki nilai, tetapi nilai barang tersebut tidaklah harus secara ekonomis. Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang yang memiliki pemilik. Apabila barang tersebut tidak dimiliki oleh siapa pun, demikian juga apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang, tidak lagi menjadi suatu objek pencurian.

c. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan barang/ benda yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain. Jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda/barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

⁶ Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana. Cet.7. hal. 79.*

Dengan demikian dalam kejahatan pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri tersebut milik orang lain secara keseluruhan, pencurian tetap ada sekalipun benda/barang tersebut kepemilikannya oleh orang lain hanya sebagian saja. Dengan kata lain unsur kepemilikan yang melekat pada barang/ benda tersebut tidak bersifat penuh.

2. Unsur subjektif

a. Dengan maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan demikian, unsur “dengan maksud” menunjuk adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, kesengajaan atau dengan maksud tersebut ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum atau tidak sah”.

Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud Pasal 362 KUHPidana harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja.

b. Memiliki untuk dirinya sendiri

Istilah “memiliki untuk dirinya sendiri” seringkali diterjemahkan dengan istilah menguasai. Namun, seseorang yang mengambil benda/ barang pada dasarnya belum sepenuhnya menjadi pemilik dari barang yang diambilnya, tetapi baru menguasai barang tersebut.

Bentuk-bentuk dari tindakan “memiliki untuk dirinya sendiri” atau “menguasai” tersebut dapat berbentuk beberapa hal misalnya

menghibahkan, menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan juga suatu tindakan yang bersifat pasif, yaitu tidak melakukan hal apapun terhadap barang tersebut, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.

c. Secara melawan hukum

Unsur “melawan hukum” memiliki hubungan erat dengan unsur “menguasai untuk dirinya sendiri”. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan penekanan pada suatu perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu dapat berubah kedudukan menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Secara umum melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, maka orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana.

Ad.2 Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang berkualifikasi (Pasal 363 KUHPidana), yaitu:

Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHPidana. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara

tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Dipidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:

Ke-1 Pencurian ternak

Ke-2 Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

Ke-3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Ke-4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(1) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Ad. 3 Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana), yaitu:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga

barang yang dicuri tidak lebih ringan dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

Ad. 4 Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana), yaitu

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan.;

Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau emanjat atau dengan memakia anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

3. Penyertaan dan pembantuan dalam tindak pidana

Teori Penyertaan Tindak Pidana Penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut. Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai:⁷

1. Yang melakukan
2. Yang menyuruh melakukan
3. Yang turut melakukan
4. Yang menggerakkan/ menganjurkan untuk melakukan
5. Yang membantu melakukan

Penyertaan diatur didalam pasal 55, 56, dan 57 KUHP. Dalam pasal 55 KUHP klasifikasi pelaku :

1. Mereka yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan.⁸

⁷ Rahman Syamsuddin *Merajut Hukum di Indonesia*, hal 211.

⁸ Rahman Syamsuddin *Merajut Hukum di Indonesia*, hal 212.

2. Mereka yang menyuruh melakukan Yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannyalah terjadi suatu tindak pidana.⁹
3. Mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:¹⁰
 - a) Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.
 - b) Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana. Setiap peserta pada turut melakukann diancam dengan pidana yang sama.’
4. Mereka yang menggerakkan/ menganjurkan/ membujuk yaitu seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu. Syarat-syarat penggerakkan yang dapat dipidana:¹¹
 - a) Ada kesengajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
 - b) Menggerakkan dengan upaya-upaya yang ada dalam pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP : pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau

⁹ Rahman Syamsuddin *Merajut Hukum di Indonesia* hal. 213

¹⁰ Rahman Syamsuddin *Merajut Hukum di Indonesia* hal. 214.

¹¹ Rahman Syamsuddin *Merajut Hukum di Indonesia* hal. 216

pengaruh kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, memberi kesempatan, alat, keterangan.

- c) Ada yang tergerak untuk melakukan tindak pidana akibat sengaja digerakkan dengan upaya-upaya dalam pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP.
- d) Yang digerakkan melakukan delik yang dianjurkan atau percobaannya

Yang digerakkan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana Klasifikasi menurut pasal 56 dan 57 KUHP yaitu membantu melakukan yaitu dengan adanya pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang didalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana dan ada orang lain yang membantu terlaksananya tindak pidana itu.

Pembantuan.

Dalam pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang di dalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan tindak pidana yakni pelaku tindak pidana itu dan ada orang lain yang lagi membantu terlaksananya tindak pidana itu. Hal ini diatur dalam pasal 56 KUHP, yang menyebutkan: Dipidana sebagai pembantu kejahatan kejahatan:¹²

- 1) Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan yang dilakukan.
- 2) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Dalam hal membantu dalam delik pelanggaran tidak dipidana.

Hal ini dipertegas dalam pasal 60 KUHP. Membantu dalam delik pelanggaran tidak dipidana karena dianggap demikian kecil kepentingan hukum yang dilanggar.

¹² Rahman Syamsuddin *Merajut Hukum di Indonesia* hal. 220

Melihat pasal 56 diatas, pembantuan dapat dibedakan berdasarkan waktu diberikannya suatu bantuan terhadap kejahatan, antara lain:

1. Apabila bantuan diberikan pada saat kejahatan dilakukan, tidak dibatasi jenis bantuannya. Berarti jenis bantuan apapun yang diberikan oleh orang yang membantu dalam suatu kejahatan dapat dipidana.
2. Apabila bantuan diberikan sebelum kejahatan dilakukan, jenis bantuan dibatasi yaitu kesempatan, sarana, dan keterangan.

Tentang pertanggungjawaban pembantu termasuk ancaman pidananya termuat dalam pasal 57 KUHP yang berbunyi:¹³

- 1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga.
- 2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
- 4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkna hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Pertanggungjawaban pembantu dibatasi hanya terhadap tindak pidana yang dibantunya saja. Apabila dalam suatu peristiwa ternyata terjadi tindak pidana yang berlebih, maka tindak pidana yang lebih tersebut bukan merupakan tanggung jawab pembantu. Kecuali tindak pidana yang timbul tersebut merupakan akibat logis dari perbuatan yang dibantunya.

¹³ Rahman Syamsuddin *Merajut Hukum di Indonesia* hal. 222

B. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan (Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/2014/PN.BLK)

Suatu tindak pidana dapat menimbulkan suatu kerugian bagi korbannya dimana selalu ada hal yang mendasari atau menjadi sebab yang melahirkan suatu akibat.

Kejahatan penadahan juga merupakan rentetan kejahatan sebelumnya. Seperti diketahui dengan adanya seseorang yang bertindak sebagai penadah akan memberikan dorongan atau rangsangan untuk melakukan kejahatan-kejahatan tersebut.

1. Identitas Terdakwa

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Nama Lengkap | : Zainuddin bin Samading |
| Tempat Lahir | : Salabundang |
| Jenis Kelamin | : 43 Tahun / 31 Desember 1970 |
| Kewarganegaraan | : Laki - laki |
| Tempat Tinggal | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Pendidikan | : SD (tidak tamat) |

2. Kasus Posisi

Terdakwa Zainuddin bin Samading, pada hari senin tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Dusun Possi Tanah, Desa Batang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau menarik keuntungan,

menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan.

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban yaitu Aldi Fedrizal Abdullah alias Adi bin H. Arzal Abdullah kehilangan barang berupa sepeda motor merek Suzuki Shogun Axelo warna merah hitam No.Polisi DD 4249 HP, nomor mesin F496-ID-441627, nomor rangka MH BF45SADJ-172580 yang diambil dengan sengaja oleh Jasmin alias Ciming bin Samarudding (dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah memperoleh motor tersebut saksi Jasmin alias Ciming bin Samarudding membawanya ke bengkel milik Terdakwa Zainuddin bin Samading. Ketika itu terdakwa bertanya dengan mengatakan “dimana lagi kamu curi motor itu?” yang dijawab oleh saksi Jasmin alias Ciming bin Samarudding “saya curi di Makassar”. Kemudian Terdakwa Zainuddin bin Samading menukar alat-alat sepeda motor Suzuki Shogun Axelo tersebut yaitu tabung shockbreaker depan dan belakang, cakram depan, aki dan lampu stop belakang lalu dipasang di sepeda motor merek Honda Supra Fit warna merah putih nomor polisi DD 3468 VQ, nomor mesin HB31E1614310 milik Terdakwa Zainuddin bin Samading sendiri, selanjutnya memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Jasmin alias Ciming bin Samarudding sebagai imbalannya.

Akibat dari perbuatan Terdakwa Zainuddin bin Samading, saksi korban Aldi Fedrizal Abdullah alias Adi bin H. Arzal Abdullah menderita kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau kurang lebih sejumlah itu.

3. Dakwaan

Terdakwa Zainuddin bin Samading, pada hari senin tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Dusun Possi Tanah, Desa Batang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan.

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban yaitu Aldi Fedrizal Abdullah alias Adi bin H. Arzal Abdullah kehilangan barang berupa sepeda motor merek Suzuki Shogun Axelo warna merah hitam No.Polisi DD 4249 HP, nomor mesin F496-ID-441627, nomor rangka MH BF45SADJ-172580 yang diambil dengan sengaja oleh Jasmin alias Ciming bin Samarudding (dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah memperoleh motor tersebut saksi Jasmin alias Ciming bin Samarudding membawanya ke bengkel milik Terdakwa Zainuddin bin Samading. Ketika itu terdakwa bertanya dengan mengatakan “dimana lagi kamu curi motor itu?” yang dijawab oleh saksi Jasmin alias Ciming bin Samarudding “saya curi di Makassar”. Kemudian Terdakwa Zainuddin bin Samading menukar alat-alat sepeda motor Suzuki Shogun Axelo tersebut yaitu tabung shockbreaker depan dan belakang, cakram depan, aki dan lampu stop belakang lalu dipasang di sepeda motor merek Honda Supra Fit warna merah putih nomor polisi DD 3468 VQ, nomor mesin

HB31E1614310 milik Terdakwa Zainuddin bin Samading sendiri, selanjutnya memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Jasmin alias Ciming bin Samarudding sebagai imbalannya.

Akibat dari perbuatan Terdakwa Zainuddin bin Samading, saksi korban Aldi Fedrizal Abdullah alias Adi bin H. Arzal Abdullah menderita kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau kurang lebih sejumlah itu.

4. Tuntutan

Adapun tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zainuddin bin Samading, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menukar, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Zainuddin bin Samading selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan semenara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah aki ;
 - 1 (Satu) buah lampu stop belakang ;

Dikembalikan kepada Saksi Aldi Fedrizal Abdullah alias Adi bin H. Arzal Abdullah ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna merah putih dengan No.Pol. DD 3468 VQ Nomor mesin HB31E1614310 dikembalikan kepada Terdakwa Zainuddin bin Samading ;

Dimana sebagian alat-alat yang ada pada sepeda motor merk Honda Supra Fit warna merah putih dengan No.Pol. DD3468 VQ Nomor mesin HB31E1614310 tersebut diatas, yang merupakan alat dari sepeda motor Suzuki Shogun Axelo berupa :

- 1 (satu) pasang tabung shockbreaker depan,
- 1 (satu) pasang tabung shockbreaker belakang,
- 1 (satu) piringan cakram depan,

Dikembalikan kepada Saksi Aldi Fedrizal Abdullah alias Adi bin H. Arzal Abdullah ;

4. Menghukum Terdakwa Zainuddin bin Samading membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

5. Pertimbangan Hakim

Penganmbilan keputusan sangatlah diperlukan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana atau hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka Hakim harus mengambil keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seorang dapat dipidana, hasil laporan pemingbing kemasyarakatan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tersebut :

- a) Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 480 ayat (1) KUHP;
- b) Hakim mempertimbangkan setelah surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, atas pernyataan Majelis Hakim terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut;
- c) Hakim mempertimbangkan terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan tersebut;
- d) Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Dusun Possi Tanah, Desa Batang , Kec. Bontotiro, Kab.Bulukumba, saksi korban **Aldi Fedrizal Abdullah Alias Adi Bin H. Arzal Abdullah** kehilangan barang berupa sepeda motor merek Suzuki Shogun Axelo warna merah hitam No.Polisi DD 4249 HP, nomor mesin F496-ID-441627, nomor rangka MHB45SADJ-172580;
- Bahwa sepeda motor tersebut diakui diambil dengan sengaja oleh saksi **Jasmin Alias Ciming Bin Samarudding** (dilakukan penuntutan secara terpisah). Dan setelah memperoleh sepeda motor tersebut saksi **Jasmin Alias Ciming Bin Samarudding** membawanya ke bengkel milik terdakwa **Sainuddin Bin Samading** di Dusun Possi Tanah, Desa Batang, Kec.Bontotiro, Kab.Bulukumba.

- Bahwa ketika itu Terdakwa **Sainuddin Bin Samading** bertanya dengan mengatakan “DIMANA LAGI KAMU CURI MOTOR ITU?” yang dijawab oleh saksi **Jasmin Alias Ciming Bin Samarudding** “SAYA CURI DARI MAKASSAR”. Kemudian **Sainuddin Bin Samading** menukar alat-alat sepeda motor Suzuki Shogun Axelo yaitu tabung shockbreaker depan dan belakang, cakram depan, aki dan lampu stop belakang lalu dipasang di sepeda motor merek Honda Supra Fit warna merah putih nomor Polisi DD 3468 VQ, nomor mesin HB31E1614310 milik Terdakwa **Sainuddin Bin Samading** sendiri.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi **Jasmin Alias Ciming Bin Samarudding** sebagai imbalannya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan di atas, Majelis Hakim dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan terbukti bersalah dan dapat dipidana, maka keseluruhan dari unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya.

Adapun hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan nomor 45/Pid.B/2014/PN.BLK yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan juga rasa keadilan hakim mengacu pada pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa antara lain :

Pertimbangan Yuridis yang diuraikan di atas, menjadi pertanyaan hukum bagi Majelis Hakim, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagai yang didakwakan Penuntut Umum di dalam dakwaannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana, yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat *alternative*, maka dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yang sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP, tentang Penadahan, berbunyi sebagai berikut : ***“Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”***

Menimbang, bahwa bagian dari unsur-unsur tersebut di atas bersifat *alternative*, dengan demikian apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut secara keseluruhan dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. PDM-23/R.4.22/Epp.2/02.2014, tertanggal 19 Februari 2014, yang berbentuk tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menggadai, mengangkut,

menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

A.d.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau badan hukum yang sehat secara jasmani dan rohani dan dapat pula mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah dihadapkan terdakwa **SAINUDDIN BIN SAMADING** dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa ada pun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya dibawah ini ;

A.d.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa bagian dari unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif, denagn demikian apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut secara keseluruhan dapat dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Dusun Possi Tanah, Desa Batang, Kec. Bontotiro, Kab. Bulukumba, saksi korban ALDI FEDRIZAL ABDULLAH ALIAS ADI BIN H. ARZAL ABDULLAH kehilangan barang berupa sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna merah hitam No.Polisi DD 4249 HP, nomor mesin F496-ID-441627, nomor rangka MHB45SADJ-172580 ;
- Bahwa sepeda motor tersebut diakui diambil sengaja oleh saksi JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDING (dilakukan penuntutan secara terpisah). Dan setelah memperoleh sepeda motor tersebut saksi CIMING BIN SAMARUDDING membawanya ke bengkel milik Terdakwa SAINUDDIN BIN SAMADING di Dusun Possi Tanah, Desa Batang, Kec. Bontotiro, Kab. Bulukumba.
- Bahwa ketika itu Terdakwa SAINUDDIN BIN SAMADING bertanya dengan mengatakan “DIMANA LAGI KAMU CURI MOTOR ITU?” yang dijawab oleh saksi JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDING “SAYA CURI DARI MAKASSAR”. Kemudian Terdakwa SAINUDDIN BIN SAMADING menukar alat-alat sepeda motor Suzuki Shogun tersebut yaitu tabung shockveraker depan dan belakang, cakram depan, aki dan lampu stop

belakang lalu dipasang di sepeda motor merek Honda Supra Fit warna merah putih nomor Polisi DD 3468 VQ, nomor mesin HB31E1614310 milik Terdakwa SAINUDDIN BIN SAMADING sendiri,

- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDING sebagai imbalannya.

Menimbang, bahwa perbuatan JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDING yang mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan atau ijin dari saksi korban ALDI FEDRIZAL ABDULLAH ALIAS ALDI BIN H. ARZAL ABDULLAH, merupakan suatu rangkaian perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “mengambil sesuatu barang yang merupakan kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi ALDI FEDRIZAL ABDULLAH ALIAS ALDI BIN H. ARZAL ABDULLAH, dengan maksud akan memiliki dengan melawan hak” dimana rangkaian perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana “pencurian”;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui secara sadar atau setidaknya patut menduga bahwa perbuatan yang dilakukan oleh JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDING tersebut, merupakan suatu kejahatan,

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui jika JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDING tidak memiliki sepeda motor merek Suzuki Shogun Axelo warna merah hitam No.Polisi DD 4249 HP, nomor mesin F496-ID-441627, nomor rangka MH BF 45SADJ-172580 tersebut yang ternyata adalah milik ALDI FEDRIZAL ABDULLAH ALIAS ALDI BIN H. ARZAL ABDULLAH, dan Terdakwa menukar sebagian alat-alat dari motor Suzuki Shogun tersebut dari JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDING, dengan

demikian unsur maka bagian unsur “*menukar suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan oleh karena semua unsur dari pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka menurut hukum dan meyakinkan hakim, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana “**penadahan**”;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh selama persidangan, dari diri Terdakwa, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut sehingga oleh karenanya Ia harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan untuk menjamin agar Terdakwa tidak melarikan diri ataupun mengulangi lagi perbuatannya maka memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka patut pula Ia dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;

1. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi korban;
2. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

6. Amar Putusan

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan terdakwa ZAINUDDIN BIN SAMADING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENADAHAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZAINUDDIN BIN SAMADING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah aki;
- 1 (satu) buah Lampu stop belakang ;

Dikembalikan kepada Saksi ALDI FEDRIZAL ABDULLAH ALIAS ALDI BIN H. ARZAL ABDULLAH ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna merah putih dengan No.Pol. DD 3468 VQ Nomor mesin HB31E1614310 dikembalikan kepada Terdakwa ZAINUDDIN BIN SAMADING ;

Dimana sebagian alat-alat yang ada pada sepeda motor merk Honda Supra Fit warna merah putih dengan No.Pol. DD3468 VQ Nomor mesin HB31E1614310 tersebut diatas, yang merupakan alat dari sepeda motor Suzuki Shogun Axelo berupa :

- 1 (satu) pasang tabung shockbreaker depan,
- 1 (satu) pasang tabung shockbreaker belakang,
- 1 (satu) piringan cakram depan,

Dikembalikan kepada Saksi ALDI FEDRIZAL ABDULLAH ALIAS ALDI BIN H. ARZAL ABDULLAH ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, Tanggal 15 April 2014, oleh Kami, LAMBERTUS LIMBONG, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIYAS DEDY, SH., dan BAMBANG SUPRIYONO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh:

A.MALIKUL ADIL Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dan dengan dihadiri oleh : MUHAMMAD ADRI KAHAMUDDIN, SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, bapak Yusti Cinianus Radjah, S.H. yang menerangkan bahwa putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan atas tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan. pada perkara ini terdakwa dijerat Pasal 480 ayat (1) KUHP tentang penadahan. Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap di persidangan kemudian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP tentang penadahan. Setelah itu Majelis Hakim menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda.

Pada perkara ini pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa sama dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang

Meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang dianggap saling *balance* atau proporsional bagi diri terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana. Lebih lanjut menurut bapak Bambang Supriyono, S.H. seperti apa yang disebutkan atau yang dinyatakan Jaksa dalam surat dakwaan.

7. Analisa Putusan

Meskipun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah penerapan hukum pidana dan pertimbangan hakim, namun penulis akan mengomentari putusan Nomor 45/Pid.B/2014/PN.Blk secara umum, mulai dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi syarat pemidanaan atau belum.

Surat Dakwaan Penuntut Umum No. PDM-23/R.4.22/Ep.2/02/2014, tertanggal 19 Februari dalam perkara ini secara teknis telah memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), yaitu telah diberi tanggal, ditandatangani, berisi identitas tersangka (nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan kepercayaan), selain itu surat dakwaan telah berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana tersebut dilakukan.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan tunggal namun bersifat alternatif sebab berisikan satu jenis tindak pidana saja yang didakwakan kepada terdakwa namun apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut secara keseluruhan dapat dinyatakan telah terpenuhi. Yaitu melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUH.Pidana **“menukar sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan.”**

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan

pertimbangan yuridisnya tetapi juga pertimbangan sosiologinya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan.

Putusan hakim seharusnya memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak termasuk bagi korban, pelaku maupun antara pelaku-pelaku kejahatan lainnya, secara yuridis seberat atau ringan apapun pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim tidak akan menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum pembedaan yang diancamkan dalam Pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan adalah apa yang mendasari atau apa alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya putusan berupa pembedaan sehingga putusan yang dijatuhkan secara obyektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa.

Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu melakukan beberapa pertimbangan baik itu aspek yuridis maupun sosiologis.

Pertimbangan yuridis merupakan konteks yang penting dalam menjatuhkan putusan dan merupakan unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi syarat dan sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan dipertimbangkan oleh Hakim, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mengambil fakta-fakta dari dalam persidangan diantaranya keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan kedalam persidangan.

Berdasarkan beberapa pertimbangan Hakim tersebut maka diperoleh fakta-fakta yang selanjutnya akan dimusyawarahkan oleh para Majelis Hakim untuk mengambil sebuah kesimpulan dalam suatu putusan. Selama pemeriksaan

dipersidangan, pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana dan alasan pembeda bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“penadahan”**, sesuai dengan dakwaan penuntut umum perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang penadahan : **“Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**.

Mengingat bahwa bagian dari unsur-unsur tersebut di atas bersifat *alternative*, dengan demikian apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut keseluruhan dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Jadi, dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 480 Ayat (1) melakukan tindak pidana penadahan yaitu **“menukar sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan hukum pidana terkait dengan tindak pidana Penadahan terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pada Pasal 480, Pasal 481 dan 482 KUHP. Tindak Pidana Penadahan dalam Pasal 480 KUHP dinyatakan bahwa : “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan”. Ke-1 Barang siapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, mrnjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau ,menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya dapat diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan. Ke-2 Barang siapa menarik keuntungan dari suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Tindak pidana penadahan tidaklah terjadi serta merta melainkan didahului oleh tindak pidana pencurian kemudian dikaitkan dengan penyertaan.
2. Pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana dalam perkara pidana penadahan dalam putusan Nomor 45/Pid.B/2014/PN.Blk bahwa putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan atas tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan. pada perkara ini terdakwa dijerat Pasal 480 ayat (1) KUHP tentang penadahan. Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap di persidangan kemudian

Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP tentang penadahan telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti serta terdapatnya pertimbangan-pertimbangan yuridis menurut KUHP, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan Hakim.

B. Saran

1. Aturan hukum di Indonesia sebaiknya dibuat sejelas mungkin agar tidak menimbulkan *ambiguitas* dalam penerapannya serta agar semua perbuatan yang meresahkan masyarakat dapat dikenai hukuman yang tegas (*legal certainty*).
2. Masyarakat diharapkan selalu waspada dan curiga, terutama terhadap barang bekas yang dijual dengan harga yang sangat jauh dari harga pasaran, terlebih lagi jika tidak dilengkapi dengan surat/nota bukti pembelian.

Daftar Pustaka

A. Sumber buku

- Abidin, Zainal. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Galia Indonesia, 2008.
- Bagaskara, Arjana. <http://arjanalawyer.blogspot.co.id/2014/03/cara-atau-teknik-untuk-merumuskan.html> diakses pada tanggal 10 Agustus 2017 pukul 14.30 Wita.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Syaamil Al-Quran, 2007.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Syaamil Al-Quran, 2007.
- Chazaw, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana. Cet. 7*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: penerbit Alumni AHM-PTHM, 1986.
- KUHP KUHP, Jakarta: Bhafana Publishing, 2014.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997.
- _____. *Delik - Delik Khusus Kejahatan - Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru. 1989.
- _____. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009 .
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015.
- Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Nurul Irfan, Muhammad. *Korupsi Dalam hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011.
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rubai, Masruchin. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Malang: UM press dan FH UB, 2001.
- Saherodji, Hari. *pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta: Aksara Baru, 1980.
- Sianturi, S.R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya*, Jakarta: Penerbit Alumni AHM-PTHM, 1986.

Soekanto, Soerjono. Hartono Widodo dan Chalimah Sutanto, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi*, Jakarta :Aksara 1988.

Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1988

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Syamsuddin, Rahman. *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014

Wardi, Ahmad. *Pengantar dan asas hukum pidana islam fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

B. Sumber Internet

Andriani, Rini. <http://www.membumikanpendidikan.com/2014/09/macam-macam-instrumen-penelitian.html?m=1> diakses pada tanggal 28 maret 2017 pada pukul 15.20 wita.

An-nur, Dhia's. <http://diachs-an-nur.blogspot.co.id/2012/05/teknik-pengolahan-data.html?m=1> diakses pada tanggal 28 maret 2017 pada pukul 16.46 wita.

Aufa, Noor <https://aufalawyer.wordpress.com/2012/06/17/penyertaan-dan-pembantuan-dalam-tindak-pidana/> diakses pada tanggal 29 juli pukul 15.55 wita.

Arief, http://smkn20.ucoz.com/pub/pendidikan/metode_penelitian_skripsi_tesis_disertasi_karya_ilmiah_instrumen_penelitian_lengkap/5 Diakses pada tanggal 28 maret 2017 pukul 15.03 wita

Liuchan, Agnez. <http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-hukum-normatif.html> diakses pada pukul 02.40 Wita Tanggal 10 Desember 2016.

News, Tribrata. <https://tribratanewspolresbulukumba.com/sat-reskrim-polres-bulukumba-menangkap-pelaku-perantara-tebus-motor-hasil-curian>, diakses pada tanggal 21 maret 2017 pada pukul 16.24 Wita.

Pengadilan Negeri Bulukumba “Sistem Informasi Pengadilan Bulukumba” www.pn.bulukumba.go.id diakses pada tanggal 29 maret 2017 pada pukul 15.55 wita.

Setiawan, Ebta. <http://kbbi.web.delik>, pada tanggal 17 Desember 2016 pukul 22.50 wita.

Setiawan, Ebta. <http://kbbi.web.id/tadah>, pada tanggal 17 Desember 2016 pukul 22.55 Wita.

Suhartono, Arif. <http://jpuarifhartono.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-unsur-unsur-jenis-dan-subyek.html> diakses pada tanggal 12 Desember 2016 pukul 12.39 Wita.

Toiti, Karim. <http://karimtoiti27.blogspot.co.id/2013/12/tindak-pidana-penadahan.html> diakses pada tanggal 12 desember 2016 pukul 14.32 Wita

**LEMBAR PENGESAHAN
DRAFT SKRIPSI**

***TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN DI KABUPATEN
BULUKUMBA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 45/PID.B/2014/PN.BLK)***

Disusun dan Diajukan Oleh

**Miftahu Mutatahirin
NIM : 10500113022**

Telah disetujui oleh Pembimbing untuk melanjutkan

Penulisan skripsi

Pada tanggal : 3 April 2017

Pembimbing I


Dr. Hamsir, SH, M.Hum
NIP. 19610404 199303 1 005

Pembimbing II


Dr. Fadli Andi Natsif, SH, MH
NIP. 19661016 201411 1 001

Diketahui Oleh
Ketua Jurusan Ilmu Hukum


Istiqamah, SH., MH

NIP: 19680120 199503 2 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Mengesahkan


Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar


Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP: 19621016 199003 1 003

PENGADILAN NEGERI KELAS I B BULUKUMBA

JL. Kenari No.5, Telepon : 0413-81022, 81164, 81140 & 81050 • Fax : 0413-81249
KABUPATEN BULUKUMBA 92511

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U11/218/HK.06.02/V/2017.

Paritera Pengadilan Negeri Bulukumba menerangkan bahwa :

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Nama lengkap | : MIFTAHUL MUTATAHIRIN |
| NPM | : 10500113022 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Program studi | : Ilmu Hukum |
| Bagian | : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum |
| Jenjang Program | : S.1 (Strata Satu) |

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di pengadilan Negeri Bulukumba pada Tanggal 22 Mei 2017, Berdasarkan surat No. 1803 SLI/PP.00.9/04/2017, Tanggal 03 April 2017, Perihal Izin Peneletian dengan Judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN DIKABUPATEN BULUKUMBA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.45/PID.B/2014/PN.BLK)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
Bulukumba, 22 Mei 2017
PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA
PANITERA,
MAKASSAR


H. SYAHRIR DAHLAN, SH

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR BULUKUMBA
Jalan Jenderal Sudirman No.08 Bulukumba 92511



SURAT KETERANGAN
Nomor. : SK / 239 / V / 2017 / Reskrim

Yang bertanda tangan dibawah ini An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BULUKUMBA,
KAUR BIN OPS SAT RESKRIM :

| | | |
|---------------|---|---|
| Nama | : | S A B R I, SH |
| Pangkat / Nrp | : | IPTU / 74030396 |
| Jabatan | : | KBO SAT RESKRIM POLRES BULUKUMBA |

Menerangkan dengan sebenar – benarnya, bahwa yang tersebut namanya dibawah ini :

| | | |
|----------------------|---|---|
| Nama | : | MIFTAHUL MUTATAHIRIN |
| Nomor Pokok | : | 10500113022 |
| Instansi / Pekerjaan | : | Mahasiswa Universitas Islam Negeri |
| Alamat | : | Jl. Slt Alauddin No.63 Makassar |

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 5992/s.01/P2T/05/2017 perihal Permohonan Izin Penelitian.

Dengan ini menjelaskan bahwa yang tersebut namanya diatas benar telah melakukan Penelitian di Polres Bulukumba dalam Rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan di Kabupaten Bulukumba Studi kasus Putusan Nomor 45/Pid.b.2014.PN.BLK*" dari tanggal 05 Mei s/d tanggal 05 Juli 2017.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar – benarnya untuk dipergunakan seperlunya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

Bulukumba, 2 Juni 2017
An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BULUKUMBA
Kaur Bin Ops Sat Reskrim

S A B R I, SH
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 74030396



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi yang berjudul, **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan di Kabupaten Bulukumba Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/2014/PN.BLK”** bernama lengkap. Miftahul Mutatahirin, Nim : 10500113022, Anak pertama dan terakhir dari pasangan Bapak Munansar Baihaky dan Ibu Rosniah Hatijah.

Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) 24 Salemba Bulukumba pada tahun 2002-2007, kemudian Penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Bulukumba tahun 2007-2010. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas (SMA) 9 Bulukumba tahun 2010-2013. Dengan tahun yang sama yakni tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar melalui **Jalur Seleksi Ujian SNMPTN** dan lulus di Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum hingga tahun 2017.

Selama menyandang status mahasiswa jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum, untuk mejalani hobi nya, penulis bergabung dan resmi menjadi anggota UKM Olahraga Cabang Olahraga Sepakbola pada tahun 2014 di UIN Alauddin Makassar, kemudian menjadi Kordinator Desa KKN UINAM Angkatan 53 pada awal tahun 2017 di desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.